

## SIARAN PERS

### Anak-anak yang terabaikan, terlupakan, dan tak terjangkau

Dalam peluncuran Laporan Situasi Anak Dunia 2006, UNICEF mengemukakan maraknya kekerasan terhadap anak sebagai pelanggaran terhadap hak anak dan mengusulkan diadakannya kajian yang lebih mendalam mengenai masalah ini.

Jakarta, 12 Januari 2006

Laporan PBB memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Asia Timur dan Pasifik menutupi kenyataan adanya kesenjangan yang semakin besar antara mereka yang mendapat manfaat dari pembangunan dan jutaan lainnya yang tertinggal dan terpinggirkan.

UNICEF dalam Laporan Situasi Anak Dunia menyimpulkan bahwa investasi masyarakat di kawasan ini untuk bidang kesehatan dan pendidikan masih sangat kurang, dan pembiayaan kesehatan dengan sumber dari pajak di kawasan ini merupakan yang terendah di dunia.

Laporan tahunan yang berjudul "Terabaikan dan Tak Terlihat" diluncurkan hari ini di Jakarta oleh Deputy Menteri Pemberdayaan Perempuan bidang Perlindungan Anak, Dra. Sumarni Dawam Rahardjo, MPA.

Laporan ini berfokus pada anak-anak yang tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap pendidikan, vaksin untuk menyelamatkan hidup, atau terhadap perlindungan diri. Anak-anak ini tumbuh diluar jangkauan kampanye-kampanye pembangunan dan jarang sekali dibahas dalam forum apapun, baik dalam diskusi di masyarakat, pembuatan peraturan, maupun penyusunan statistik dan berita-berita di media massa.

Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan besar sepanjang satu dasawarsa ini dalam berbagai Tujuan Pembangunan Milenium, terutama dalam mengurangi kemiskinan serta meningkatkan pendidikan dan kemampuan baca tulis, kemajuan masih lamban di bidang-bidang lain, seperti mengurangi kekurangan gizi anak-anak, meningkatkan kesehatan ibu, dan akses terhadap air yang aman.

Pada peluncuran tersebut, Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia, Dr. Gianfranco Rotigliano menghimbau diadakannya kajian mendalam mengenai masalah perlakuan salah terhadap anak. "Apa yang kita lihat baru-baru ini hanyalah puncak dari sebuah gunung es. Kita memerlukan data yang lebih mendalam agar bisa mengatasi masalah ini."

UNICEF melakukan dua penelitian pada tahun 2002 dan 2003 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang hasilnya menunjukkan keseriusan perlakuan salah terhadap anak. Meskipun kehati-hatian diperlukan untuk tidak begitu saja menganggap penelitian ini sebagai ceminan keadaan di Indonesia, namun temuan ini memperingatkan akan tingginya angka perlakuan salah terhadap anak. Survei pada tahun 2002 yang melibatkan 125 anak berlangsung selama enam bulan, dan mencakup wawancara yang dipantau secara cermat, mendapatkan bahwa dua pertiga anak laki-laki dan sekitar sepertiga anak perempuan pernah dipukul. Lebih dari seperempat anak perempuan yang disurvei pernah diperkosa. Dalam survei yang lebih luas cakupannya pada tahun 2003, yang melibatkan 1.700 anak, kebanyakan anak melaporkan pernah ditampar, ditonjok, atau dilempari sesuatu. Namun tidak ada bukti mengenai adanya kasus perkosaan.

"Perlakuan salah terhadap anak adalah pelanggaran hak anak, dan menurut UU Perlindungan Anak, ini merupakan suatu tindak kejahatan. Kami mendukung Pemerintah Indonesia untuk mengambil sejumlah tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran ini," demikian dr. Rotigliano.

## SIARAN PERS

Laporan Situasi Anak Dunia 2006 menyatakan, meskipun sebagian negara di Asia Timur dan Pasifik merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, kesenjangan sosial di kawasan ini juga semakin melebar, sehingga memperburuk masalah seperti kekurangan gizi, buruh anak dan perdagangan anak. Sekitar 14 % orang di Asia Timur dan Pasifik hidup dengan penghasilan kurang dari \$1 per hari. Laporan ini menyebutkan bahwa seorang anak yang lahir di keluarga yang berada dalam kelompok 20 % paling miskin rata-rata memiliki kemungkinan tiga kali lebih besar untuk meninggal daripada seorang anak yang lahir pada kelompok 20 persen paling kaya di Asia Timur dan Pasifik.

Di Indonesia hal ini bisa dilihat pada angka kematian balita yang memiliki perbedaan dramatis antar propinsi, dengan jangka mulai dari 23 kematian per 1.000 kelahiran hidup hingga 103 kematian per 1000 kelahiran hidup. Sekitar separuh dari jumlah kematian bayi dan anak mungkin bisa dikaitkan pada kekurangan gizi, yang sering diawali dengan rendahnya berat bayi pada saat kelahiran. Tingkat kekurangan berat badan balita memang telah menurun secara nasional, namun masih lebih dari 40 % di kawasan timur Indonesia, dengan perbedaan yang sangat besar dibandingkan bagian barat Indonesia. Kurangnya tinggi badan dan berat badan anak masih tetap tinggi, masing-masing sekitar 34% dan 16 %.

Angka kematian ibu juga masih tetap tinggi, yaitu 307 per 100.000, dibandingkan dengan rata-rata Asia Timur yang 110 per 100.000. Angka ini bahkan lebih buruk lagi di Kawasan Timur Indonesia.

"Jika tidak diberikan perhatian khusus, maka jutaan anak akan tetap terjebak dan terlupakan serta menjadi anak-anak terabaikan, yang menimbulkan konsekuensi sangat merusak terhadap kesejahteraan hidup jangka panjang mereka, serta pada pembangunan bangsa. Masyarakat yang menaruh perhatian terhadap kesejahteraan anak-anak dan masa depan bangsa seharusnya mencegah terjadinya hal ini," lanjut Dr. Rotigliano.

Laporan *Situasi Anak Dunia* menyatakan bahwa dunia harus melakukan langkah-langkah tambahan diluar upaya pembangunan yang ada untuk memastikan agar anak-anak yang rentan terhadap kondisi-kondisi diatas bisa terlindungi dan tidak terabaikan. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk berupaya menjangkau anak-anak ini, dan harus meningkatkan upaya yang mereka lakukan dalam empat bidang penting:

- **Penelitian, pemantauan dan pelaporan:** Sistem-sistem yang mencatat dan melaporkan terjadinya kekerasan terhadap anak sangat penting untuk menjangkau anak-anak yang terabaikan dan terlupakan.
- **Perundang-undangan:** Hukum nasional harus disesuaikan dengan komitmen internasional terhadap anak-anak, dan perundang-undangan yang bisa menimbulkan diskriminasi harus diubah atau dicabut. Undang-undang untuk menghukum mereka yang membahayakan anak-anak harus ditegakkan secara konsisten.
- **Pembiayaan dan pembangunan kapasitas:** Anggaran yang berfokus pada anak-anak serta penguatan lembaga-lembaga yang melayani anak-anak harus menyertai perbaikan di bidang peraturan dan penelitian.
- **Program:** Reformasi sangat diperlukan di banyak negara dan komunitas untuk mengilangkan hambatan terhadap anak-anak yang terabaikan dari layanan-layanan yang penting.

Dalam upaya menghapus perlakuan salah terhadap anak, UNICEF mendukung disusunnya pedoman bagi para guru untuk mencegah kekerasan terhadap anak di sekolah. Bekerjasama dengan Departemen Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia, UNICEF membangun kompetensi para dokter melalui training tentang bagaimana mengenali, merujuk, dan melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Di beberapa propinsi, UNICEF bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan mendukung didirikannya Unit Layanan Khusus di berbagai rumah sakit bagi anak-anak yang menjadi korban perlakuan salah, serta meningkatkan peran desk perempuan dan anak di berbagai kantor polisi. UNICEF juga membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perlakuan salah terhadap anak melalui survei di propinsi-propinsi tertentu serta membantu dibentuknya pemantauan dan mekanisme pelaporan mengenai perlakuan salah terhadap anak yang berbasis masyarakat.

## SIARAN PERS

### LEMBAR FAKTA

Selama satu dasawarsa terakhir ini Indonesia telah mencapai kemajuan dalam pencapaian berbagai Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*), khususnya dalam hal pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendidikan serta melek huruf. Namun demikian, kemajuan tampak lamban dalam berbagai bidang, seperti pengatasan kekurangan gizi, peningkatan kesehatan ibu, dan akses terhadap air yang aman. Kesenjangan yang besar masih menjadi tantangan Indonesia: misalnya, angka kematian balita sangat berbeda antar propinsi, yaitu berkisar antara 23 hingga 103 per 1.000 kelahiran hidup. Sejak dilakukannya desentralisasi, pelaksanaan undang-undang, kebijakan dan standar nasional di seluruh penjuru Indonesia yang sangat luas ini masih menghadapi berbagai tantangan akibat lemahnya kapasitas dalam hal perencanaan dan pengelolaan layanan publik di berbagai kabupaten yang seluruhnya berjumlah 440 di 33 propinsi.

#### **Angka kematian bayi dan balita**

Dengan angka kematian bayi sebesar 35 per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian balita sebesar 46 per 1.000 kelahiran hidup, Indonesia berada di jalur yang baik dalam upaya mencapai sasaran Tujuan Pembangunan Milenium untuk mengurangi angka kematian bayi dan balita. Meskipun demikian, angka kematian antar propinsi bisa sangat berbeda satu sama lain. Demikian juga halnya dengan wilayah perkotaan dan pedesaan. 76% kematian anak balita terjadi pada usia dibawah 12 bulan, dan sebanyak 45% kematian bayi terjadi pada usia dibawah 28 hari (neonatal). Tiga penyebab utama kematian bayi adalah komplikasi perinatal (dibawah usia 7 hari), infeksi pernapasan akut, dan diare. Sekitar sepertiga kematian balita dan separuh kematian bayi terjadi pada masa perinatal (dibawah usia 7 hari), yang berkaitan dengan layanan penting selama kehamilan dan persalinan. Sedangkan penyebab utama kematian anak (usia 1– 4 tahun) adalah infeksi pernapasan akut, diare, penyakit yang ditularkan melalui binatang dan penyakit-penyakit yang bisa dicegah melalui vaksinasi.

#### **Imunisasi**

Imunisasi telah menunjukkan peningkatan sejak tahun 1990an, dengan diimunasinya 72 % anak-anak berusia 12-23 bulan untuk melindungi mereka dari penyakit campak. Cakupan imunisasi masih berbeda-beda, sehingga wabah campak masih sering terjadi. Kasus polio kembali muncul pada tahun 2005, pertama kalinya sejak tahun 1996, dengan ditemukannya 236 kasus dalam jangka sembilan bulan pertama. Cakupan DPT3 rendah, sehingga 1,7 juta anak berusia 12-23 bulan tak terlindungi setiap tahunnya dari penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Satu dari lima kabupaten beresiko tinggi terhadap penyakit tetanus yang menimpa ibu yang baru melahirkan dan bayi yang baru lahir. Malaria masih menjangkiti sekitar 20 % penduduk, khususnya di kawasan timur. Hanya 10 % dari 30 juta kasus tahunan yang ditangani di klinik-klinik maupun rumah sakit.

#### **Gizi**

Sekitar separuh kematian bayi dan anak kemungkinan berkaitan dengan kekurangan gizi yang sering diawali dengan rendahnya berat badan bayi ketika dilahirkan. Kasus kurangnya berat badan anak balita secara nasional telah menurun, tetapi angkanya masih lebih dari 40% di kawasan timur Indonesia, yang menunjukkan terjadinya kesenjangan antar daerah. Kurangnya tinggi dan berat badan anak masih tetap terjadi, yang angkanya berkisar pada 34 dan 16 %. ASI eksklusif masih tetap rendah, yaitu 40% pada enam bulan pertama. Hal ini disebabkan oleh pengenalan makanan secara dini kepada bayi, tantangan modernisasi dan meningkatnya peran para ibu sebagai pekerja.

## SIARAN PERS

Meskipun 73 % rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium pada tahun 2003 (meningkat dari angka yang sebelumnya 50% pada tahun 1995), sekitar 58 juta orang masih beresiko kekurangan yodium. Beberapa survei di tingkat nasional juga menunjukkan tingginya angka anemia di kalangan perempuan hamil (40%) dan perempuan usia subur (28%). Indonesia telah berhasil memberantas xerophthalmia (kerusakan kornea mata akibat kekurangan vitamin A), namun demikian, kekurangan vitamin A masih menjadi masalah kesehatan masyarakat.

### Kematian ibu

Angka kematian ibu masih tinggi, yaitu 307 per 100.000. Sebagai perbandingan angka rata-rata di Asia Timur adalah 110 per 100.000. Penyebab utama kematian ibu antara lain adalah perdarahan, eclampsia (keracunan kehamilan) dan tekanan darah tinggi, komplikasi akibat keguguran, persalinan yang terganggu, serta infeksi. Satu dari empat persalinan masih mengandalkan bantuan dukun bersalin.

### Pendidikan dasar

Kebijakan mengenai wajib belajar sembilan tahun mencakup enam tahun di sekolah dasar (usia 7-12 tahun) dan tiga tahun di sekolah menengah pertama (usia 13-15 tahun). Pelaksanaan kebijakan sejak tahun 1994 telah mengantarkan Indonesia pada angka partisipasi di tingkat sekolah dasar sebesar 94%. Namun demikian, angka partisipasi di tingkat sekolah menengah pertama hanya mencapai 65%. Indonesia mencapai kemajuan yang tidak merata dalam mencapai sasaran Tujuan Pembangunan Milenium yang relevan, mengingat adanya dua juta anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Angka Partisipasi Kasar yang tinggi mencerminkan proporsi yang signifikan mengenai anak-anak yang berusia diatas usia rata-rata pada suatu jenjang pendidikan. Perbaikan-perbaikan dalam mutu pendidikan, pengurangan inefisiensi dan kesenjangan geografis masih merupakan prioritas utama, demikian pula dengan upaya mengedepankan hak setiap anak untuk mengenyam pendidikan dasar sembilan tahun, serta pemberian kesempatan bagi para remaja sebagai strategi utama untuk mencegah perburuhan anak dan eksploitasi (termasuk perdagangan anak).

### HIV/AIDS

Penyebaran HIV/AIDS di Indonesia masih terkonsentrasi di 12 propinsi, saat yang penting untuk menghindari epidemi yang lebih luas. Cara penularan utama melalui penggunaan narkoba suntik dan hubungan seks menempatkan remaja-remaja Indonesia pada resiko yang lebih tinggi. Pada tahun 2010, diperkirakan ada 110.000 orang yang menderita atau telah meninggal karena AIDS dan satu juta lainnya positif HIV. Meskipun prevalensi HIV diantara perempuan hamil yang menjalani tes kurang dari 3%, data handal bagi masyarakat umum masih kurang. Stigma, diskriminasi dan ketidaktahuan merupakan hambatan utama. Pada tahun 2003, sepertiga remaja putri dan seperlima remaja putra berusia 15-24 tahun belum pernah mendengar tentang HIV/AIDS. Di Indonesia, sama halnya dengan kebanyakan negara lain di dunia. Anak-anak masih merupakan kelompok yang belum diperhatikan dalam hal HIV/AIDS. Padahal mereka menanggung beban akibat penyebaran HIV/AIDS, yaitu ketika mereka kehilangan orang tuanya akibat HIV/AIDS. Pada kebanyakan kasus, mereka kemudian terlempar ke jalanan, menjadi buruh anak dan menjajakan seks agar bisa bertahan hidup. Perkiraan Departemen Kesehatan pada 2002 mengenai orang-orang yang hidup dengan HIV/AIDS menunjukkan bahwa 59 anak yang tinggal di jalanan mengidap HIV, virus penyebab AIDS. Jumlah kasus yang dilaporkan mungkin jauh lebih sedikit jumlahnya dibandingkan angka yang sebenarnya. Berdasarkan angka kesuburan total sebesar 2,5 pada tahun 2003, diperkirakan ada 2.250 hingga 3.250 bayi yang beresiko tertular HIV setiap tahunnya di Indonesia.

### Perlindungan anak

## SIARAN PERS

Sekitar 60% anak balita di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran; setengah diantaranya bahkan kelahirannya tidak tercatat dimanapun juga. Anak-anak yang tak tercatat kelahirannya tidak muncul dalam statistik resmi dan tidak diakui sebagai anggota masyarakat. Tanpa identitas yang tercatat, anak-anak tidak terjamin pendidikan dan kesehatannya, serta layanan-layanan dasar lainnya yang berdampak pada masa kanak-kanak dan masa depannya. Tidak adanya pencatatan kelahiran mempertinggi resiko anak terhadap eksploitasi dan pemalsuan umur serta identitas. Terdapat tiga juta anak yang memiliki pekerjaan berbahaya. Setidaknya 30% dari para pekerja seks perempuan di Indonesia berusia dibawah 18 tahun, bahkan ada yang berusia 10 tahun yang dipaksa terlibat dalam pelacuran. Diperkirakan terdapat 100.000 perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan setiap tahunnya, kebanyakan sebagai pekerja seks komersial di Indonesia dan luar negeri. Sekitar 12% perempuan dinikahkan pada usia sekitar atau sebelum 15 tahun. Sekitar 4.000 hingga 5.000 anak berada di lembaga pemasyarakatan, lembaga rehabilitasi dan penjara; 84% dari anak-anak yang dihukum ini ditahan bersama para penjahat dewasa. Studi baru-baru ini mengungkapkan bahwa penganiayaan dan kekerasan terhadap anak dan perempuan lazim terjadi di Indonesia, termasuk di rumah-rumah, kantor-kantor, dan lembaga-lembaga. Sekitar 20% anak-anak yang terkena pengaruh konflik bersenjata mengalami tekanan psikososial tingkat madya, serta terdapat sejumlah anak yang terpisah dari keluarganya atau terlibat dengan kelompok bersenjata.

### **Kebijakan Pemerintah**

Pemerintah Indonesia telah memperkuat kebijakan nasional dan kerangka perundang-undangan untuk melindungi hak-hak anak, yaitu dengan mengundangkan UU Perlindungan Anak pada tahun 2002; UU mengenai Pendidikan Dasar pada tahun 2003; Komitmen Sentani pada tahun 2004 untuk melawan HIV/AIDS; Rencana Aksi Nasional pada tahun 2002 mengenai Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak, Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak, serta Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan. Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015 (PNBAI) diluncurkan pada tahun 2004. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk pada bulan Oktober 2003 melalui proses yang demokratis dan transparan. UU No. 23 tahun 2004 mengenai kekerasan dalam rumah tangga merupakan langkah positif untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peraturan perundangan yang saat ini masih dibahas maupun dalam proses revisi – mengenai pencatatan sipil, pekerja migran, perdagangan manusia, perlindungan terhadap korban dan saksi, perkawinan, dan peradilan anak – diharapkan akan memperkuat perlindungan terhadap anak dan perempuan. Komite Hak-hak Anak di Jenewa menyambut baik inisiatif Pemerintah Indonesia untuk mencabut keberatan-keberatannya terhadap beberapa pasal Konvensi Hak Anak; memuji kemajuan Indonesia dalam upayanya melindungi hak-hak anak; dan mendorong diratifikasinya *Optional Protocols* serta tindakan untuk memperbaiki keadaan anak-anak yang terkena pengaruh konflik, penyalahgunaan narkoba, perdagangan anak serta eksploitasi seksual ekonomi.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

UNICEF Communication Officers: John Budd & Kendantanti Subroto, telepon 570 5816 ext. 298 & 251,  
email: [jbudd@unicef.org](mailto:jbudd@unicef.org), [ksubroto@unicef.org](mailto:ksubroto@unicef.org)